NUMBAY : Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN 3030-9719 (online)
Vol. 4, No. 1, 2026, pp. 59-75

PELATIHAN *LEGAL DRAFTING* BAGI PENGURUS BKMT SE- KABUPATEN JAYAPURA

Lukman Ansar[1]*, Qutsiyah[2], Zulfadli [3], Amri [4], Sabar Podu[5], Dandi Wahyudin[6], Satriawan Rettob[7], Etwin Mangintiku[8]

[1,2,3,4,5,7,8]Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia
[6]Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia
Coresponding Author: lukmananansar208@gmail.com

Abstrak

Organisasi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan pemberdayaan sosial. Namun, dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, masih ditemukan keterbatasan kemampuan pengurus dalam menyusun dokumen hukum dan administrasi yang sesuai dengan kaidah *legal drafting*. Kondisi tersebut juga dialami oleh pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura yang menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan surat keputusan, surat tugas, berita acara, nota kesepahaman, dan dokumen organisasi lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BKMT dalam menyusun dokumen hukum organisasi secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *legal drafting*. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan workshop penyusunan dokumen organisasi. Sasaran kegiatan adalah 40 orang pengurus BKMT dewasa (perempuan dan laki-laki) dari tingkat kabupaten, distrik, dan kelompok majelis ta'lim di Kabupaten Jayapura. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar *legal drafting*, fungsi dokumen hukum organisasi, serta teknik penyusunan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam tata kelola organisasi, dengan rata-rata skor meningkat dari 39,8 menjadi 79,5. Melalui sesi praktik, peserta mampu menyusun dokumen organisasi dengan struktur dan format yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi sosial keagamaan. Pelatihan *legal drafting* menunjukkan hasil yang positif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BKMT se-Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis pengurus dalam penyusunan dokumen hukum organisasi, tetapi juga mendukung

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author

terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Badan Kontak Majelis Ta'lim, *Legal drafting*, Organisasi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kelembagaan.

Abstract

Socio-religious organizations play a vital role in supporting community development through various educational activities, religious guidance, and social empowerment. However, in carrying out organizational activities, there are still limitations in the ability of administrators to prepare legal and administrative documents in accordance with legal drafting principles. This condition is also experienced by administrators of the Majelis Ta'lim Contact Body (BKMT) throughout Jayapura Regency, who face various obstacles in preparing decrees, assignment letters, minutes, memoranda of understanding, and other organizational documents. This community service activity aims to improve the knowledge and skills of BKMT administrators in preparing organizational legal documents accurately, systematically, and in accordance with legal drafting principles. The implementation method uses a participatory approach that actively involves participants through the stages of needs identification, training, direct practice, mentoring, and evaluation. Methods used include interactive lectures, group discussions, case studies, and workshops on preparing organizational documents. The target of the activity is 40 adult BKMT administrators (women and men) from the regency, district, and majelis ta'lim groups in Jayapura Regency. The results of the activity demonstrated an increased understanding of the participants regarding the basic concepts of legal drafting, the function of organizational legal documents, and the techniques for drafting various documents required for organizational governance, with the average score rising from 39.8 to 79.5. Through practical sessions, participants were able to draft organizational documents with a better structure and format than previously. This activity also raised awareness of the importance of legality, accountability, and professionalism in managing socio-religious organizations. The legal drafting training showed positive results in strengthening the institutional capacity of the BKMT (Islamic Community Empowerment Agency) throughout Jayapura Regency. This activity not only improved the technical competence of administrators in drafting organizational legal documents but also supported the realization of more professional, transparent, and sustainable organizational governance in providing services to the community.

Keywords*: Majelis Ta'lim Contact Body, Legal drafting, Social Organizations, Community Empowerment, Institutional Strengthening.*

DOI: 10.53491/numbay.v4i1.2152

PENDAHULUAN

Organisasi sosial memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, organisasi sosial berbasis keagamaan telah menjadi mitra penting pemerintah dalam menyampaikan nilai-nilai pembangunan serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Salah satu organisasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat adalah Majelis Ta'lim. Sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat, Majelis Ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga menjadi wadah penguatan karakter, pengembangan kapasitas perempuan, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Jayapura, keberadaan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) menjadi representasi organisasi sosial keagamaan yang memiliki jaringan luas hingga tingkat kampung dan distrik. Aktivitas yang dilakukan BKMT mencakup berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga kegiatan kemanusiaan yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan berbagai program tersebut, pengurus organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang memadai, termasuk kemampuan dalam menyusun berbagai dokumen hukum dan administrasi organisasi secara baik dan benar. Kemampuan tersebut menjadi penting mengingat setiap kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan dasar hukum, pedoman kerja, serta dokumen administratif yang dapat menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan *legal drafting* pada sebagian pengurus organisasi sosial, khususnya pengurus yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum serta administrasi organisasi. Dalam konteks Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), kemampuan *legal drafting* tidak harus dikuasai secara mendalam oleh seluruh pengurus, melainkan perlu diprioritaskan kepada pengurus yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas tersebut, seperti ketua, sekretaris, bidang organisasi, serta pengurus lain yang bertanggung jawab atas administrasi dan legalitas kelembagaan. Ketua perlu memahami aspek legalitas dokumen dalam pengambilan keputusan, sedangkan sekretaris dan bidang organisasi memiliki peran penting dalam penyusunan, pemeriksaan, serta pengarsipan dokumen organisasi. *Legal drafting* merupakan keterampilan menyusun dokumen hukum yang mencakup peraturan organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), surat keputusan, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, pedoman organisasi, serta berbagai surat resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan organisasi. Keterbatasan kemampuan pada pengurus yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian format, penggunaan bahasa hukum yang kurang tepat, lemahnya dasar legalitas program, hingga potensi terjadinya konflik dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas *legal drafting* perlu diarahkan kepada pengurus yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyusunan

dan pengelolaan dokumen, tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman dasar mengenai legalitas organisasi bagi seluruh pengurus BKMT. Atas dasar itu, pelatihan ini dirancang dengan dua tingkat sasaran, yaitu pengurus kunci (ketua, sekretaris, serta bidang organisasi dan administrasi) sebagai peserta inti yang dilatih hingga tahap praktik penyusunan dokumen, dan pengurus lainnya sebagai peserta pendukung yang dibekali pemahaman dasar tentang legalitas organisasi.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada sebagian pengurus BKMT di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan sejumlah pengurus organisasi, diketahui bahwa penyusunan dokumen organisasi masih dilakukan secara sederhana dan cenderung mengandalkan contoh-contoh dokumen yang diperoleh dari pihak lain tanpa memahami prinsip-prinsip penyusunannya. Akibatnya, banyak dokumen yang belum memenuhi kaidah *legal drafting* yang baik, baik dari aspek substansi maupun teknik penulisan. Situasi ini berpotensi menghambat efektivitas organisasi dalam menjalankan program-programnya serta mengurangi tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap tata kelola organisasi.

Di sisi lain, perkembangan regulasi dan tuntutan tata kelola organisasi yang semakin baik mengharuskan organisasi sosial untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, kemampuan *legal drafting* menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Dokumen hukum yang disusun secara baik tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi organisasi dan para anggotanya.

Lebih jauh, penguatan kapasitas *legal drafting* bagi pengurus BKMT memiliki nilai strategis karena sebagian besar pengurus merupakan tokoh perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Peningkatan kemampuan mereka dalam memahami dan menyusun dokumen hukum akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi komunitas yang mereka dampingi. Pengurus yang memahami aspek legalitas organisasi akan lebih mampu mengelola program secara profesional, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan *legal drafting* juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan hukum. Pendidikan hukum tidak selalu dilakukan melalui jalur formal, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas kelembagaan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai teknik penyusunan dokumen hukum, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menyusun berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan teknis pengurus dalam bidang *legal drafting*.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pelatihan *Legal drafting* Bagi Pengurus Organisasi Sosial (Badan Kontak Majelis Ta'lim se-Kabupaten Jayapura) menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri pengurus dalam menyusun berbagai dokumen hukum organisasi secara tepat dan profesional. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, serta mendukung keberlanjutan berbagai program sosial keagamaan yang dijalankan oleh BKMT di Kabupaten Jayapura. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas pengurus organisasi melalui pelatihan *legal drafting* diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya organisasi sosial yang mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Unsur kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, dari sisi lokus, kegiatan ini menyasar pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu telah melaksanakan pelatihan *legal drafting* bagi kelompok sasaran yang berbeda, antara lain aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat. aparatur desa di Kabupaten Banyumas, aparatur desa di Makassar, serta mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Lhokseumawe. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan *legal drafting* telah diterapkan dalam konteks pemerintahan desa dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan di Kabupaten Jayapura memperluas konteks penerapan pelatihan tersebut ke dalam organisasi sosial keagamaan, khususnya BKMT.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan kemampuan *legal drafting* tidak hanya membutuhkan transfer pengetahuan, tetapi juga keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan, memahami permasalahan organisasi, serta mempraktikkan secara langsung penyusunan dokumen hukum yang relevan dengan aktivitas organisasi mereka. Melalui pendekatan partisipatif, proses pembelajaran diharapkan berlangsung secara dialogis, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura.

Sasaran kegiatan ini adalah para pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) tingkat kabupaten, distrik, dan kelompok majelis ta'lim yang aktif menjalankan fungsi organisasi sosial keagamaan di wilayah Kabupaten Jayapura. Kegiatan pelatihan *legal drafting* ini melibatkan pengurus BKMT tingkat kabupaten, pengurus BKMT tingkat distrik, perwakilan pengurus kelompok majelis ta'lim. Jumlah peserta sebanyak 40 orang yang seluruhnya berusia dewasa, terdiri atas perempuan dan laki-laki, dengan komposisi peserta inti (ketua, sekretaris, serta bidang organisasi dan administrasi) dan peserta pendukung

(bendahara dan pengurus lainnya). Peserta dipilih karena memiliki peran penting dalam pengelolaan organisasi, penyelenggaraan program kerja, serta penyusunan berbagai dokumen administratif dan kelembagaan yang membutuhkan pemahaman mengenai aspek legalitas organisasi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan kegiatan observasi dan identifikasi kebutuhan mitra. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus BKMT Kabupaten Jayapura guna memperoleh gambaran mengenai kondisi organisasi, kebutuhan pelatihan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan dokumen hukum organisasi. Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi kelompok, wawancara sederhana, serta telaah terhadap beberapa dokumen organisasi yang telah digunakan sebelumnya.

Hasil identifikasi kebutuhan kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi pelatihan. Materi yang disiapkan meliputi konsep dasar *legal drafting*, teknik penyusunan surat keputusan organisasi, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), penyusunan proposal kerja sama, pembuatan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), serta teknik penyusunan surat resmi organisasi yang sesuai dengan kaidah hukum dan administrasi yang berlaku.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik langsung (*workshop*). Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya *legal drafting* dalam tata kelola organisasi sosial. Namun demikian, penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah, melainkan melalui dialog yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan organisasi.

Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi diskusi kelompok guna membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan legalitas organisasi dan penyusunan dokumen hukum. Melalui diskusi tersebut, peserta dapat saling bertukar pengalaman serta memperoleh solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik organisasi.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, tim pengabdian juga menggunakan metode studi kasus dengan menghadirkan contoh-contoh dokumen organisasi yang sering digunakan dalam kegiatan BKMT. Peserta diminta untuk menganalisis isi dokumen, mengidentifikasi kekurangan yang terdapat di dalamnya, serta memberikan alternatif perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip *legal drafting* yang baik.

Pada sesi *workshop*, peserta secara langsung mempraktikkan penyusunan berbagai dokumen organisasi, seperti surat keputusan pengurus, surat tugas, berita acara kegiatan, perjanjian kerja sama, dan pedoman organisasi. Praktik langsung ini bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan teknis peserta sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan organisasi sehari-hari.

3. Tahap Pendampingan

Setelah pelaksanaan pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada peserta untuk memastikan bahwa materi yang telah diberikan dapat diterapkan secara efektif. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi langsung maupun komunikasi daring yang memungkinkan peserta memperoleh bimbingan ketika mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen organisasi.

Pendampingan merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat karena perubahan kapasitas tidak dapat dicapai hanya melalui pelatihan sesaat. Proses pendampingan memberikan ruang bagi peserta untuk terus belajar, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas dokumen yang mereka susun secara bertahap. Dengan demikian, keberlanjutan hasil kegiatan dapat lebih terjamin.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas peserta. Evaluasi dilaksanakan melalui pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik *legal drafting*. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan menilai hasil praktik penyusunan dokumen yang telah dibuat oleh peserta selama kegiatan berlangsung.

Aspek yang dievaluasi meliputi tingkat pemahaman materi, kemampuan menyusun dokumen hukum organisasi, partisipasi peserta dalam kegiatan, serta tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi pengembangan program penguatan kapasitas organisasi sosial di masa yang akan datang. Skor *pre-test* dan *post-test* dihitung dalam skala 0–100 dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan rata-rata skor setiap aspek sebelum dan sesudah pelatihan; karena tidak dilakukan uji statistik inferensial, peningkatan yang dilaporkan bersifat deskriptif. Hasil praktik dinilai oleh tim pengabdian menggunakan lembar penilaian dengan lima kriteria, yaitu sistematika dan struktur dokumen, ketepatan bahasa hukum, kelengkapan unsur formal, kejelasan substansi, serta kesesuaian dasar hukum atau AD/ART, dan dibandingkan dengan hasil telaah dokumen organisasi yang dilakukan pada tahap persiapan.

Melalui metode pelaksanaan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai *legal drafting*, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola organisasi BKMT se-Kabupaten Jayapura secara profesional, akuntabel, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang baik. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan berbagai program sosial keagamaan yang dijalankan oleh BKMT dalam melayani dan memberdayakan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Legal drafting*

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa Pelatihan *Legal drafting* bagi Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura dilaksanakan sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan organisasi sosial keagamaan dalam bidang administrasi dan legalitas organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus BKMT tingkat kabupaten, distrik, dan kelompok majelis ta'lim yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayapura. Pembahasan pada bagian ini disusun secara berurutan, mulai dari profil peserta, tahapan pelaksanaan beserta dokumentasinya, hasil evaluasi pemahaman, hasil praktik penyusunan dokumen, hingga dampak serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan.

Profil dan Karakteristik Peserta

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Musala Balai Trans, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 17 April 2026. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang seluruhnya berusia dewasa, terdiri atas 28 perempuan (70,0%) dan 12 laki-laki (30,0%). Mereka merupakan pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) tingkat kabupaten, distrik, dan kelompok majelis ta'lim yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayapura. Karakteristik peserta secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Tabel 1. Karakteristik Peserta Pelatihan (n = 40)

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Perempuan	28	70,0
	Laki-laki	12	30,0
Usia	20–29 tahun	5	12,5
	30–39 tahun	11	27,5
	40–49 tahun	14	35,0
	≥ 50 tahun	10	25,0
Tingkat kepengurusan	BKMT tingkat kabupaten	12	30,0
	BKMT tingkat distrik	15	37,5
	Kelompok majelis ta'lim	13	32,5
Jabatan	Ketua/wakil ketua	7	17,5
	Sekretaris	9	22,5
	Bidang organisasi/administrasi	8	20,0
	Bendahara	6	15,0
	Pengurus bidang lain/anggota	10	25,0
Pendidikan terakhir	SMA/sederajat	12	30,0
	Diploma/Sarjana	21	52,5
	Magister	7	17,5
Pengalaman pelatihan sejenis	Belum pernah	33	82,5
	Pernah	7	17,5

Sumber: Daftar hadir dan formulir data peserta kegiatan PkM, 2026.

Dari sisi jenis kelamin, peserta didominasi perempuan (70,0%), sejalan dengan karakter BKMT sebagai organisasi majelis ta'lim yang berbasis pada jamaah perempuan.

Kehadiran 12 peserta laki-laki (30,0%) menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen organisasi tidak hanya dipikul oleh pengurus perempuan, tetapi juga melibatkan unsur laki-laki dalam kepengurusan dan kelompok majelis ta'lim.

Dari sisi usia, sebagian besar peserta berada pada rentang 40 tahun ke atas, yaitu 24 orang (60,0%), sedangkan peserta berusia 20–39 tahun berjumlah 16 orang (40,0%). Komposisi ini menuntut penyampaian materi yang konkret dan berbasis contoh dokumen, karena peserta dewasa cenderung lebih mudah memahami materi yang langsung berkaitan dengan pengalaman dan kebutuhan organisasinya.

Dari sisi jabatan, 24 peserta (60,0%) adalah pengurus kunci yang bersentuhan langsung dengan penyusunan dokumen, yakni ketua/wakil ketua, sekretaris, serta bidang organisasi dan administrasi. Sisanya, 16 peserta (40,0%), adalah bendahara dan pengurus bidang lain yang dibekali pemahaman dasar legalitas organisasi. Komposisi ini sesuai dengan prioritas sasaran pelatihan sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan.

Dari sisi pendidikan, 28 peserta (70,0%) berpendidikan diploma atau sarjana ke atas, sedangkan 12 peserta (30,0%) berpendidikan SMA/sederajat. Selain itu, 33 peserta (82,5%) belum pernah mengikuti pelatihan sejenis. Keragaman latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman pelatihan tersebut menjadi dasar penggunaan bahasa yang sederhana, contoh dokumen yang dekat dengan kegiatan BKMT, serta pembentukan kelompok workshop dengan komposisi campuran antara tingkat kepengurusan dan latar belakang pendidikan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi

Pelatihan dilaksanakan dalam satu hari melalui lima tahapan yang berurutan, mulai dari pembukaan hingga penutupan dan pendampingan lanjutan. Tahapan, bentuk kegiatan, serta dokumentasi pada masing-masing tahap dirangkum pada Tabel 2, sedangkan dokumentasi visual kegiatan disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi

No	Tahapan	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumentasi
1	Pembukaan dan pre-test	Pembukaan oleh tim pengabdian dan pengurus BKMT Kabupaten Jayapura, penjelasan tujuan dan alur kegiatan, serta pengisian pre-test oleh 40 peserta	Gambar 1a, 1b; lembar pre-test
2	Penyampaian materi	Ceramah interaktif tentang konsep dasar *legal drafting*, bahasa hukum, serta struktur surat keputusan, berita acara, dan nota kesepahaman (MoU)	Gambar 1c, 1d
3	Diskusi dan studi kasus	Diskusi kelompok dan analisis contoh dokumen organisasi yang biasa digunakan BKMT	Gambar 1f; lembar kerja kelompok
4	Workshop penyusunan dokumen	Delapan kelompok (masing-masing lima orang) menyusun surat keputusan, surat tugas, berita acara, dan MoU, disertai koreksi bersama oleh tim	Dokumen hasil workshop (32 dokumen)

No	Tahapan	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumentasi
5	Evaluasi, penutupan, dan pendampingan	Pelaksanaan post-test, pengisian angket kepuasan, penutupan dan foto bersama, serta pendampingan lanjutan secara daring	Gambar 1e; lembar post-test dan angket

Sumber: Dokumentasi dan arsip kegiatan PkM, 2026.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian materi mengenai pentingnya *legal drafting* dalam tata kelola organisasi modern. Pada sesi ini peserta diberikan pemahaman bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyusun dan mengelola dokumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan setiap kegiatan. Dokumen hukum yang tersusun dengan baik akan memberikan kepastian, keteraturan, serta perlindungan hukum bagi organisasi dan para anggotanya (Gambar 1a dan 1b).

Selanjutnya peserta memperoleh materi mengenai prinsip-prinsip dasar *legal drafting*, teknik penggunaan bahasa hukum yang efektif, struktur penyusunan surat keputusan organisasi, penyusunan berita acara, penyusunan nota kesepahaman (MoU), serta teknik penyusunan pedoman dan tata tertib organisasi. Materi disampaikan secara interaktif dengan memberikan contoh-contoh dokumen yang sering digunakan dalam aktivitas organisasi sosial keagamaan (Gambar 1c dan 1d).

Antusiasme peserta terlihat selama proses pelatihan berlangsung. Sebagian besar peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang mereka hadapi dalam penyusunan dokumen organisasi. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka sering menggunakan format dokumen yang diperoleh dari organisasi lain tanpa memahami dasar hukum maupun teknik penyusunannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelatihan *legal drafting* memang cukup tinggi di lingkungan BKMT Kabupaten Jayapura. Suasana diskusi dan tanya jawab tampak pada Gambar 1f.

Setelah sesi materi dan diskusi, peserta dibagi ke dalam delapan kelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang dengan komposisi campuran antara pengurus kunci dan pengurus pendukung. Setiap kelompok menyusun empat dokumen, yaitu surat keputusan, surat tugas, berita acara, dan MoU, sehingga terkumpul 32 dokumen yang kemudian dikoreksi bersama oleh tim pengabdian. Pada akhir kegiatan, peserta mengerjakan post-test dan mengisi angket kepuasan, dilanjutkan dengan penutupan dan foto bersama (Gambar 1e). Pendampingan lanjutan dilakukan secara daring melalui grup percakapan selama empat minggu setelah pelatihan, dengan 9 permintaan konsultasi yang terutama berkaitan dengan penyusunan surat keputusan kepengurusan dan format berita acara.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui empat indikator utama, yaitu: (1) peningkatan skor pemahaman peserta antara pre-test dan post-test terhadap konsep dan teknik *legal drafting*; (2) kemampuan peserta menghasilkan dokumen organisasi (surat keputusan, surat tugas, berita acara, dan nota kesepahaman) yang sesuai kaidah *legal drafting* pada sesi praktik; (3) tingkat partisipasi dan keaktifan peserta selama sesi ceramah, diskusi, dan workshop; serta (4) tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan

secara keseluruhan. Instrumen pre-test dan post-test yang digunakan sama, berupa 20 butir soal pilihan ganda dan uraian singkat yang dikelompokkan ke dalam lima aspek pemahaman, yaitu konsep dasar *legal drafting* dan legalitas organisasi, penggunaan bahasa hukum dan struktur dokumen, teknik penyusunan surat keputusan, teknik penyusunan berita acara, serta teknik penyusunan nota kesepahaman (MoU), dengan skor 0–100. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test Peserta

No	Aspek yang Diukur	Skor Pre-test (rata-rata)	Skor Post-test (rata-rata)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman konsep dasar *legal drafting*	44,0	82,5	87,5
2	Penggunaan bahasa hukum dan struktur dokumen	36,5	77,0	111,0
3	Teknik penyusunan surat keputusan	39,0	79,5	103,8
4	Teknik penyusunan berita acara	46,0	84,0	82,6
5	Teknik penyusunan nota kesepahaman (MoU)	33,5	74,5	122,4
	Rata-rata keseluruhan	**39,8**	**79,5**	**99,7**

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta (n = 40), skala 0–100, 2026. Peningkatan (%) dihitung relatif terhadap skor pre-test.

Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami secara memadai mengenai struktur dokumen hukum organisasi, teknik penyusunan surat keputusan, maupun prinsip-prinsip penggunaan bahasa hukum. Banyak peserta yang menganggap bahwa penyusunan dokumen organisasi hanya sebatas kegiatan administratif biasa tanpa memahami aspek legalitas yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini tercermin dari hasil pre-test, yaitu 29 dari 40 peserta (72,5%) berada pada kategori pemahaman kurang (skor di bawah 60) dan hanya 3 peserta (7,5%) yang mencapai kategori baik (skor 75 ke atas).

Setelah mengikuti pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman berdasarkan rata-rata skor yang naik dari 39,8 pada pre-test menjadi 79,5 pada post-test (Tabel 3). Mereka mulai memahami fungsi setiap jenis dokumen organisasi, tata cara penyusunannya, serta pentingnya penggunaan bahasa yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang mengombinasikan ceramah, diskusi, dan praktik langsung mampu membantu peserta memahami materi secara lebih efektif.

Peningkatan terbesar tampak pada aspek penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang meningkat dari 33,5 menjadi 74,5, padahal aspek ini memiliki skor pre-test terendah. Skor post-test tertinggi dicapai pada aspek penyusunan berita acara (84,0). Perubahan distribusi peserta menurut kategori pemahaman disajikan pada Tabel 4: peserta pada kategori baik bertambah dari 3 orang (7,5%) menjadi 29 orang (72,5%), sedangkan peserta pada kategori kurang berkurang dari 29 orang (72,5%) menjadi 2 orang (5,0%). Peningkatan tersebut

perlu dibaca sebagai peningkatan deskriptif, karena pada kegiatan ini tidak dilakukan uji statistik sehingga istilah signifikan dalam arti statistik tidak digunakan.

Tabel 4. Distribusi Peserta Menurut Kategori Pemahaman

Kategori Pemahaman	Pre-test: jumlah (%)	Post-test: jumlah (%)
Kurang (skor < 60)	29 (72,5)	2 (5,0)
Cukup (skor 60–74)	8 (20,0)	9 (22,5)
Baik (skor ≥ 75)	3 (7,5)	29 (72,5)
Jumlah	**40 (100,0)**	**40 (100,0)**

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta (n = 40), 2026.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam mendorong penguatan kelembagaan BKMT di masa mendatang.

Temuan peningkatan pemahaman peserta pada kegiatan ini sejalan dengan sejumlah kajian pengabdian *legal drafting* terdahulu, meskipun dengan objek dampingan yang berbeda. Sumiyati dkk. (2023) melaporkan bahwa pelatihan *legal drafting* bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta sebesar 85,7 persen, dari kondisi awal di mana 66,7 persen peserta belum mengetahui tata cara penyusunan dokumen hukum. Demikian pula Hikmawati dkk. (2023) menemukan bahwa pendampingan *legal drafting* bagi aparatur desa di Kabupaten Banyumas mampu meningkatkan pemahaman perangkat desa yang sebelumnya asing dengan istilah *legal drafting* menjadi mampu menyusun dan memverifikasi produk hukum desa secara mandiri. Sementara itu, Puspitasari dan Nur (2022) menunjukkan bahwa pelatihan *legal drafting* juga efektif meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat sipil dalam konteks yang berbeda, yaitu perlindungan konsumen. Kesamaan pola pada ketiga kajian tersebut bahwa pendekatan pelatihan partisipatif disertai praktik langsung secara konsisten meningkatkan kompetensi *legal drafting* kelompok sasaran—memperkuat validitas temuan pada kegiatan pengabdian ini. Perbedaan utamanya terletak pada karakteristik kelompok sasaran: jika penelitian-penelitian tersebut berfokus pada aparatur pemerintahan desa, kegiatan ini menyasar pengurus organisasi sosial keagamaan yang bersifat sukarela dengan peserta dewasa, perempuan dan laki-laki, yang beragam dalam usia dan latar belakang pendidikan, sehingga tantangan dan kebutuhan pendampingannya turut memiliki kekhasan tersendiri.

Hasil Praktik Penyusunan Dokumen Organisasi

Pada sesi workshop, peserta dibagi ke dalam delapan kelompok untuk menyusun dokumen yang umum digunakan dalam kegiatan organisasi. Dokumen yang disusun meliputi surat keputusan kepengurusan, surat tugas, berita acara kegiatan, proposal kerja sama, serta nota kesepahaman.

Hasil praktik menunjukkan bahwa peserta mampu menerapkan materi yang telah diperoleh selama pelatihan. Meskipun masih ditemukan beberapa kesalahan teknis, seperti penggunaan istilah hukum yang kurang tepat dan ketidaksesuaian format dokumen, secara umum kualitas dokumen yang dihasilkan menunjukkan peningkatan dibandingkan dokumen yang sebelumnya digunakan oleh organisasi.

Untuk menunjukkan perubahan kualitas dokumen secara lebih terukur, tim pengabdian menilai 32 dokumen hasil workshop (surat keputusan, surat tugas, berita acara, dan MoU) menggunakan lima kriteria *legal drafting*. Hasilnya dibandingkan dengan telaah terhadap 10 dokumen organisasi yang digunakan BKMT sebelum pelatihan dan dikumpulkan pada tahap persiapan (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Penilaian Dokumen Sebelum Pelatihan dan Hasil Workshop

No	Kriteria Penilaian	Dokumen organisasi sebelum pelatihan (n = 10), jumlah (%)	Dokumen hasil workshop (n = 32), jumlah (%)
1	Sistematika dan struktur dokumen	4 (40,0)	28 (87,5)
2	Ketepatan bahasa hukum	3 (30,0)	25 (78,1)
3	Kelengkapan unsur formal (nomor, tanggal, tanda tangan)	5 (50,0)	29 (90,6)
4	Kejelasan substansi dan tidak multitafsir	4 (40,0)	26 (81,3)
5	Kesesuaian dasar hukum/AD-ART	2 (20,0)	23 (71,9)
	Rata-rata pemenuhan kriteria (%)	**36,0**	**81,9**

Sumber: Lembar penilaian dokumen oleh tim pengabdian, 2026.

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa proporsi dokumen yang memenuhi kriteria meningkat pada seluruh aspek. Kesalahan yang masih ditemukan terutama berkaitan dengan kesesuaian dasar hukum atau AD/ART (9 dari 32 dokumen belum sesuai) dan ketepatan penggunaan istilah hukum (7 dari 32 dokumen belum tepat). Temuan ini sekaligus menunjukkan aspek yang perlu diprioritaskan pada pendampingan lanjutan.

Melalui proses pendampingan dan koreksi bersama, peserta dapat memahami letak kesalahan serta memperbaiki dokumen yang telah disusun. Pendekatan pembelajaran berbasis praktik ini menunjukkan hasil yang baik karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam menyusun dokumen hukum yang relevan dengan kebutuhan organisasi mereka.

Lebih dari sekadar menghasilkan dokumen, proses praktik juga membangun rasa percaya diri peserta dalam menghadapi berbagai kebutuhan administratif organisasi di masa mendatang. Para peserta tidak lagi merasa bergantung sepenuhnya kepada pihak lain ketika harus menyusun dokumen organisasi yang memiliki konsekuensi hukum.

Dampak Kegiatan terhadap Penguatan Kelembagaan BKMT

Pelatihan *legal drafting* memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan BKMT Kabupaten Jayapura. Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar dokumen organisasi disusun secara sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *legal drafting*. Setelah pelatihan, peserta mulai memahami pentingnya standar penyusunan dokumen yang baik sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang profesional.

Dampak pelatihan terhadap penguatan kelembagaan dilihat dari keterlibatan peserta, tingkat kepuasan, dan kesiapan peserta menerapkan hasil pelatihan, yang diukur melalui daftar hadir, lembar observasi, dan angket pada akhir kegiatan (Tabel 6).

Tabel 6. Indikator Keterlibatan, Kepuasan, dan Kesiapan Penerapan

No	Indikator	Hasil
1	Kehadiran peserta pada seluruh sesi	40 dari 40 peserta (100,0%)
2	Peserta yang aktif bertanya atau menyampaikan pendapat	31 peserta (77,5%)
3	Kelompok yang menyelesaikan seluruh dokumen workshop	8 dari 8 kelompok (100,0%)
4	Kepuasan: relevansi materi (skala 1–5)	4,60
5	Kepuasan: kemampuan narasumber (skala 1–5)	4,70
6	Kepuasan: metode diskusi dan praktik (skala 1–5)	4,80
7	Kepuasan: fasilitas dan alokasi waktu (skala 1–5)	4,10
8	Rata-rata kepuasan keseluruhan (skala 1–5)	4,55
9	Peserta yang merasa lebih percaya diri menyusun dokumen	34 peserta (85,0%)
10	Peserta yang berencana menerapkan hasil pelatihan di organisasinya	36 peserta (90,0%)

Sumber: Daftar hadir, lembar observasi, dan angket peserta (n = 40), 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak pelatihan tidak hanya terlihat pada pengetahuan, tetapi juga pada keterlibatan dan kesiapan peserta menerapkan hasilnya di organisasi. Nilai kepuasan terendah terdapat pada fasilitas dan alokasi waktu (4,10), yang sejalan dengan temuan mengenai keterbatasan waktu pelatihan pada bagian faktor penghambat. Namun demikian, dampak jangka panjang terhadap tata kelola BKMT belum diukur dalam kegiatan ini dan memerlukan pemantauan lanjutan, misalnya melalui penelaahan dokumen organisasi yang disusun BKMT setelah pelatihan.

Peningkatan kapasitas ini menjadi penting karena BKMT merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga. Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, maupun pihak swasta dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kemampuan *legal drafting* juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat didukung oleh dokumen yang jelas sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, *legal drafting* tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya motivasi peserta untuk meningkatkan kapasitas diri dan organisasi. Kedua, dukungan penuh dari pengurus BKMT Kabupaten Jayapura yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Ketiga, relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan nyata yang dihadapi peserta dalam menjalankan organisasi.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan selama kegiatan berlangsung antara lain perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman peserta (12 peserta berpendidikan

SMA/sederajat dan 28 peserta berpendidikan diploma ke atas; lihat Tabel 1) yang menyebabkan kecepatan pemahaman materi menjadi beragam. Selain itu, keterbatasan waktu pelatihan yang hanya satu hari juga menyebabkan beberapa materi belum dapat dibahas secara lebih mendalam. Namun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan pendampingan dan diskusi kelompok yang memungkinkan peserta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pelatihan *Legal drafting* bagi Pengurus BKMT se-Kabupaten Jayapura berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menyusun dokumen hukum organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan BKMT sebagai organisasi sosial keagamaan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan *Legal drafting*: (a) suasana peserta di Musala Balai Trans; (b) pembukaan kegiatan; (c) dan (d) penyampaian materi oleh narasumber; (e) foto bersama peserta dan tim pengabdian; (f) sesi diskusi dan tanya jawab

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan *Legal drafting* bagi Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menyusun dokumen hukum dan administrasi organisasi secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *legal drafting*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik penyusunan dokumen organisasi seperti surat keputusan, surat tugas, berita acara, serta nota kesepahaman (MoU). Peserta yang terdiri atas pengurus BKMT tingkat kabupaten, distrik, dan kelompok majelis ta'lim mengikuti

kegiatan dengan antusias serta aktif berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola organisasi sosial keagamaan, sehingga diharapkan mampu mendukung penguatan kelembagaan BKMT dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan kampanye anti-bullying di SMP 1 Atap Sabron Sari berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai berbagai bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta cara pencegahannya. Melalui metode partisipatif yang melibatkan penyuluhan, diskusi interaktif, penulisan pesan anti-bullying, dan pemberian reward, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara kognitif tetapi juga mengembangkan empati dan kepedulian terhadap teman sebaya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian siswa sebelumnya belum menyadari bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, dan merendahkan teman termasuk bentuk perundungan. Setelah mengikuti kegiatan, siswa menunjukkan perubahan pemahaman yang ditandai dengan kemampuan mengidentifikasi perilaku bullying dan menyampaikan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, guru dan pihak sekolah juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran mereka dalam mencegah dan menangani kasus bullying.

Oleh karena itu, program edukasi anti-bullying perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan sekolah lainnya. Keberlanjutan program diharapkan mampu memperkuat budaya saling menghargai, meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, khususnya kepada Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) se-Kabupaten Jayapura yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta pelatihan, panitia pelaksana, serta institusi yang telah memberikan dukungan moril, fasilitas, dan kerja sama sehingga kegiatan Pelatihan *Legal drafting* ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

Adi, I. R. (2018). Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Rajawali Pers.

Hamidi, J. (2019). Teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. UB Press.

Haris, S. (2018). Organisasi kemasyarakatan dan penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., Setiawan, B. A. P., & Prabowo, A. M. (2023). Pendampingan kompetensi *legal drafting* sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 1008–1015. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904

Indrati S., M. F. (2020). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Pedoman penyelenggaraan majelis ta'lim. Direktorat Penerangan Agama Islam.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.

Mulia, S. M. (2019). Perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Gramedia Pustaka Utama.

Puspitasari, R. D., & Nur, I. (2022). Pemberdayaan konsumen melalui pelatihan *legal drafting* dalam mitigasi wanprestasi. J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 10(2), 105–111.

Sanjaya, W. (2019). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Kencana.

Sedarmayanti. (2018). Good governance dan good corporate governance. Mandar Maju.

Soekanto, S. (2017). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suharto, E. (2021). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.

Sumiyati, Suwondo, S., Susanti, I., Milanti, A. A., & Maulana, M. Y. (2023). Peningkatan kompetensi menyusun *legal drafting* bagi aparatur dan badan permusyawaratan desa di Desa Cigugurgirang. Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 5(3), 118–123. https://doi.org/10.35799/vivabio.v5i3.51471